

---

## PENGUATAN LULUSAN SMK BIDANG AKUNTANSI UNTUK SERTIFIKASI KOMPETENSI DI KALIMANTAN TIMUR

### STRENGTHENING VOCATIONAL ACCOUNTING GRADUATES FOR COMPETENCE CERTIFICATION IN EAST KALIMANTAN

E. Retno Maninggarjati<sup>1</sup>, Ibrahim<sup>2</sup>, Ratna Wulaningrum<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Samarinda, Samarinda

E-mail correspondence: [ratna@polnes.ac.id](mailto:ratna@polnes.ac.id) / [ratna.polnes.01@gmail.com](mailto:ratna.polnes.01@gmail.com)

---

#### Article History:

Received: 03.09.2022

Revised: 05.09.2022

Accepted: 09.09.2022

**Abstrak:** Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), merupakan acuan yang bersifat legal formal dalam penataan kualifikasi nasional dalam bidang ketenagakerjaan. Permasalahan yang ada di SMK Kaltim dalam mewujudkan lulusan yang kompeten dan berdaya saing untuk mencapai serapan lulusan yang tinggi masih cukup kompleks. Kegiatan diskusi dan sosialisasi sesama pengelola atau pimpinan/kepala sekolah bersama mitra baik lembaga pendidikan, dunia industri dan juga masyarakat khususnya orang tua siswa diperlukan untuk menemukan solusi bagi permasalahan yang dihadapi sekolah. Komitmen pimpinan sekolah, guru, orang tua/wali murid, dan dinas pendidikan sangat diperlukan untuk memenuhi kualifikasi lulusan sebagaimana yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Program sertifikasi lulusan sangat penting untuk diperhatikan oleh sekolah, pemerintah dan orang tua/wali murid. Mutu guru juga perlu ditelaah agar dapat memenuhi strategi mengajar yang baik sehingga transfer informasi kepada siswa berjalan dengan lancar. Sosialisasi yang lebih masif sangat diperlukan oleh sekolah terkait sertifikasi kompetensi bagi siswa dan lulusan sekolah.

**Kata Kunci:** Lulusan SMK, Sertifikasi Kompetensi

**Abstract:** Presidential regulation number 8 of 2012, concerning the Indonesian National Qualifications Framework (KKNI), is a formal legal reference in structuring national qualifications in the workforce sector. The problems that exist at vocational high school in realizing competent and competitive graduates to achieve high graduate absorption are still quite complex. Discussion and socialization activities between managers or school leaders/principals with partners, both educational institutions, the industrial world and also the community, especially parents, are needed to find solutions to problems faced by schools. The commitment of school leaders, teachers, parents/guardians, and the education office is very much needed to meet the graduate qualifications needed by the workplace. The graduate certification program is very important to be considered by schools, the government and parent of students. The quality of teachers also needs to be reviewed to fulfill a good teaching strategy so that the transfer of information to students runs smoothly. More massive socialization is needed b schools regarding competency certification for students and school graduates.

**Keywords:** Vocational High School Graduates, Competency Certification

## PENDAHULUAN

### Analisis Situasi

Dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan serta menekan angka pengangguran lulusan SMK yang masih relatif tinggi dimana data BPS menunjukkan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 11,13% per Agustus 2021, maka pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan baik jangka pendek maupun jangka panjang antara lain membuka kesempatan peluang kerja di berbagai bidang di BUMN, membuka kesempatan dinas belajar pada sekolah kedinasan, memberikan program pelatihan keahlian, *softskill* dan penguatan sekolah melalui peningkatan kompetensi guru dan peningkatan sarana dan prasarana.

Di wilayah Kaimantan Timur terdapat 221 SMK dimana 87 merupakan SMK Negeri dan 134 merupakan SMK Swasta dengan total siswa 79.121 dan 4.637 orang guru. Dari data tersebut tentunya merupakan tantangan yang tidak ringan untuk mewujudkan sumber daya manusia sebagai lulusan yang kompeten di bidangnya sehingga lulusan dapat berkarya dan dapat menekan tingkat pengangguran. Bidang keahlian SMK di Kaltim dapat terbagi dalam 6 (enam) kelompok yaitu, kelompok Teknik Informatika & Rekayasa, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Kesehatan, Seni kerajinan dan Pariwisata, Agrobisnis & Agro Industri serta Bisnis dan Manajemen. Dari seluruh kelompok tersebut 97 SMK yang berarti 45 % merupakan kelompok bidang Bisnis dan Manajemen dimana salah satunya adalah Program Studi Akuntansi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), merupakan acuan yang bersifat legal formal dalam penataan kualifikasi nasional dalam bidang ketenagakerjaan. Perpres ini dijadikan rujukan oleh lembaga pendidikan dan pelatihan dalam merumuskan kurikulum dan program pelatihan, bagi lembaga sertifikasi profesi dalam melaksanakan sertifikasi kompetensi (uji kompetensi) dan merumuskan lingkup (skema sertifikasi), dan bagi dunia industri dalam proses rekrutmen terutama terkait dengan pengakuan tingkat kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan. Sertifikat berstandar nasional dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dimana pelaksanaan ujian kompetensi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi profer (LSP). Pada tahun 2022 data LSP Polnes diketahui bahwa pelaksanaan uji kompetensi keahlian akuntansi standar nasional BNSP untuk SMK Putra Bangsa Bontang menunjukkan bahwa 86% peserta dinyatakan kompeten sebagai Teknisi Akuntansi Pratama (kualifikasi 3).

Sertifikat kompetensi yang dimiliki akan menjadi bukti kemampuan lulusan yang diakui oleh lembaga pemerintah. Sertifikat ini akan menjadi parameter kemampuan lulusan

SMK agar memudahkan untuk direkrut oleh perusahaan. Tentunya juga akan mendapatkan jenjang karir yang sesuai dengan hasil uji kompetensi. Proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Berdasar Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No, 182 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).

### **Permasalahan Mitra**

Beberapa masalah yang dihadapi beberapa SMK di Kalimantan Timur pada umumnya antara lain :

- a. Masih rendahnya penyerapan tingkat lulusan SMK
- b. Masih kurang aktifnya promosi pengelola SMK untuk lulusannya
- c. Stigma sekolah pilihan kedua bagi siswa
- d. Belum banyak siswa lulusan SMK yang berlisensi nasional untuk bidang akuntansi
- e. Kurangnya sinkronisasi kurikulum dengan keperluan dunia industri yang lebih mengharapkan untuk praktik lebih besar dari teori
- f. Masih kurangnya pengembangan kompetensi guru
- g. Masih kurangnya sarana sekolah dalam pengembangan akuntansi berbasis teknologi
- h. Kurangnya komitmen pengelola sekolah terhadap pentingnya sertifikasi kompetensi

Dari permasalahan yang ada tersebut, tim membatasi untuk lebih pada masalah standarisasi lulusan SMK melalui sertifikasi kompetensi akuntansi.

### **Solusi dan Target**

Permasalahan yang ada di SMK Kaltim dalam mewujudkan lulusan yang kompeten yang daya saing untuk mencapai serapan lulusan yang tinggi memang cukup kompleks. Beberapa hal yang menjadi dasar dalam mencari solusi masalah adalah:

1. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
2. Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKN
3. Kepmenakertrans No.182 Tahun 2013 tentang SKKNI
4. Empat (4) kompetensi yang harus dimiliki guru salah satunya kompetensi profesionalisme
5. Peningkatan Mutu profesionalisme Guru diharapkan lebih baik dan merata
6. Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian SMK
7. Manajemen pengelolaan sekolah yang profesional
8. Komitmen Pengelola Sekolah beserta tim terhadap mutu lulusan

9. Evaluasi dan pengembangan kurikulum secara berkala
10. Membangun jaringan kerja sama sekolah dan Dudi

Berdasar hal tersebut diatas maka solusi untuk peningkatan kualitas lulusan dipengaruhi oleh komitmen pengelola sekolah atau pimpinan sekolah. Tanpa komitmen yang kuat maka semua program-program kegiatan pengembangan berbagai hal seperti pengembangan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru dan siswa dan kegiatan lainnya tidak berjalan dengan efektif. Semua itu akan berdampak pada pencapaian visi dan misi sekolah. Untuk itu diperlukan *sharing knowledge* sesama pengelola/pimpinan/kepala bersama mitra baik lembaga pendidikan, dunia industri dan juga masyarakat khususnya orang tua siswa.

Pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dalam bentuk seminar, workshop atau sosialisasi yang diikuti oleh kepala sekolah atau perwakilan sekolah beserta perwakilan Dinas Pendidikan yang terkait sehingga menambah pengetahuan terkait manfaat sertifikasi kompetensi lulusan SMK dan menginventaris permasalahan serta mencoba mencari beberapa alternatif penyelesaian masalah, sehingga akan membantu penyelesaian masalah SMK secara bersama.

#### **METODE PELAKSANAAN KEGIATAN**

Pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat berupa workshop Pengabdian Masyarakat Penguatan Lulusan SMK Bidang Akuntansi untuk Sertifikasi Kompetensi di Kalimantan Timur dilakukan bagi pengelola sekolah/pimpinan sekolah/kepala sekolah/perwakilan sekolah. Pembahasan yang dilakukan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Sosialisasi

Tahap ini dilakukan sebelum pelaksanaan kegiatan. Tujuannya adalah melakukan survei awal dan pemetaan tentang permasalahan yang dihadapi peserta (siswa), guru serta kepala sekolah terkait persiapan untuk mengikuti uji kompetensi akuntansi.

2. Perancangan

Penyusunan materi *workshop* terkait penguatan lulusan SMK Bidang Akuntansi untuk Sertifikasi Kompetensi. Penyusunan materi ini dilakukan oleh narasumber dari pengelola SMK yang telah melakukan uji kompetensi standar BNSP dengan tujuan *best practice sharing* kepada SMK lainnya. Selain itu materi terkait dengan gambaran skema dan

model pelaksanaan Uji Kompetensi juga diberikan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat.

3. Implementasi/Pelaksanaan

Workshop ini mengenai pelaksanaan uji kompetensi keahlian akuntansi untuk skema sertifikasi teknisi akuntansi junior serta pratama. Dalam pelaksanaan workshop ini diharapkan pejabat yang terkait dari Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Timur sebagai unsur pemerintah dapat lebih mengetahui permasalahan yang dihadapi sekolah terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi dan membangun komitmen bersama sekolah dan pihak terkait dalam berbagai usaha dalam peningkatan kualitas lulusan SMK.

4. Evaluasi

Evaluasi kegiatan program kemitraan masyarakat dilakukan dengan memberikan kuisisioner evaluasi kepada responden. Tujuan evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan pada proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan program kemitraan masyarakat. Selain itu diharapkan akan dibuat resume hasil diskusi para peserta untuk kemajuan SMK serta komitmen bersama saling bekerja sama.

5. Penyusunan Laporan Kegiatan dan Publikasi Hasil

Hasil akhir kegiatan program kemitraan masyarakat berupa laporan kegiatan akan disusun oleh tim pelaksana paling lambat pada bulan november. Luaran wajib kegiatan program kemitraan masyarakat ini berupa publikasi hasil kegiatan di jurnal ilmiah dan media massa (koran).

### **Khalayak Sasaran**

Peserta kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah kepala sekolah dan ketua yayasan SMK di kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Bontang dan kabupaten Kutai Kartanegara.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Penguatan Lulusan SMK Bidang Akuntansi untuk Sertifikasi Kompetensi di Kalimantan Timur dilaksanakan di Hotel Grand Sawit (Rumbia Meeting Room Lt.1) Samarinda. Peserta yang hadir terdiri dari perwakilan SMK (Kepala Sekolah, Ketua Yayasan, Koordinator Program Studi di SMK) yang ada di kota Samarinda, kota Balikpapan, kota Bontang dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang isu-isu utama dan terbaru pendidikan vokasi baik pada lingkup lokal maupun nasional.

Isu utama yang disampaikan adalah tingkat pengangguran lulusan SMK, daya saing lulusan yang masih rendah, IKN, serta pengembangan SMK yang baik dalam rangka menghasilkan tenaga kerja yang siap pakai. Sementara isu pendidikan vokasi yang ada adalah bahwa lulusan SMK pada umumnya masih pada tingkat siap latih, kualifikasi lulusan pendidikan vokasi belum memiliki kualifikasi, biaya sertifikasi kompetensi yang cukup mahal, serta permasalahan *link and match* antara dunia pendidikan dan dunia kerja.

Kegiatan didahului pemaparan materi dari narasumber dilanjutkan dengan diskusi. Pada sesi diskusi, peserta menyampaikan berbagai pertanyaan serta permasalahan yang terjadi di sekolah masing-masing, yang selanjutnya ditanggapi oleh narasumber berupa pemberian saran-saran yang nantinya dapat diterapkan di sekolah tersebut. Hasil diskusi dan pertanyaan yang diajukan serta jawaban yang diberikan oleh narasumber menjadi sarana pertukaran informasi yang bermanfaat bagi semua pihak, terutama pada usaha peningkatan kompetensi lulusan SMK. Keterlibatan aktif berbagai pihak sangat memiliki peran agar lulusan SMK benar-benar siap kerja dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidangnya. Peran pemerintah daerah dan juga orang tua siswa sangat membantu pihak sekolah dalam usaha mewujudkan usaha menghasilkan lulusan SMK yang memenuhi kualifikasi kompetensi.

Sertifikat asesor-asesor dari SMK banyak yang sudah *expired* (tidak berlaku) sehingga perlu peran Diknas dan sekolah untuk memprogramkan *re-assessment* asesor. Pemberdayaan asesor sekolah untuk meningkatkan pemahaman pentingnya lulusan yang kompeten sesuai standar nasional kepada pihak-pihak terkait perlu ditingkatkan. Selain itu optimalisasi peran MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sangat diperlukan dalam menghasilkan lulusan yang kompeten.

## SIMPULAN

Peningkatan kompetensi lulusan adalah dengan membekali sertifikasi. Program sertifikasi lulusan sangat penting untuk diperhatikan tidak saja oleh sekolah, namun juga pemerintah dan orang tua/wali murid. Selain itu mutu guru juga perlu ditelaah agar dapat memenuhi strategi mengajar yang baik sehingga transfer informasi kepada siswa berjalan dengan lancar. Sosialisasi yang lebih masif sangat diperlukan oleh sekolah terkait sertifikasi kompetensi bagi siswa dan lulusan sekolah. Pemberdayaan asesor sekolah dan optimalisasi peran MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) sangat diperlukan untuk meningkatkan pemahaman pentingnya lulusan yang kompeten sesuai standar nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Jasa Profesional, Ilmiah, dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknisi Akuntansi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.